Pengkodean Partisipan 6

Nama : Yose Herlianingsih, S.IP, M.M.

NIP : 19700808 200312 2 004

Jabatan : Auditor Madya, Plt Sekretaris Inspektorat

Pangkat/Golongan : Penata Tk.1 III/D

Pendidikan Terakhir : S2

Tanggal Wawancara : 02 Maret 2021

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Durasi Wawancara : 15 menit, 10 detik

Kode Peneliti : R

Kode Partisipan : P6

| No | Referensi | Transkrip Wawancara | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (R, 1) | Ada tidak upaya buat studi banding atau kunjungan ke Pemda lain atau ke Universitas dalam rangka penguatan akuntabilitas, Pak? |  |
| 2 | (P6, 2) | Termasuk kerjasama dengan pihak ketiga lah, gitu. Diantaranya dengan (Universitas 2) | * Kerjasama dengan universitas |
| 3 | (R, 3) | Kalau nanti sifat perbaikan misalkan ada rekomendasi atau saran dari evaluator dari inspektorat, itu langsung diperbaiki terlebih dahulu atau untuk periode berikutnya? |  |
| 4 | (P6, 4) | Jadi, sebelum dilakukan perbaikan berdasarkan dokumen, juga kita memberikan pemahaman-pemahaman ya kepada pimpinan-pimpinan terkait lah yang mempunyai e..risiko, sehingga memahami isi daripada e..dokumen itu apa, gitu. | * pendampingan |
| 5 | (R, 5) | Terkait dengan *reward and punishment,* apakah misalkan ada *punishment* tersendiri buat misalkan kinerjanya belum sesuai apa yang ditargetkan, gitu. Terus apakah ada *rewatd* jika misalnya kinerjanya tercapai? Bisa dari kepala daerah untuk tiap OPD misalnya. |  |
| 6 | (P6, 6) | *Reward* buat SKPD? Belum ada. |  |
| 7 | (R, 7) | Oh dari internal berarti ya Bu? |  |
| 8 | (P6, 8) | Iya, dari internal. | * Terdapat *reward* dari pihak internal |
| 9 | (P6, 9) | Yang harus dilakukan selama ini itu, evaluasi itu terus dilakukan monitoring juga sih. Rutinitas, gitu. | * monitoring rutin |
| 10 | (R, 10) | Oh.. misalnya *weekly* atau *monthly* gitu? Tapi selama ini belum ada Bu? |  |
| 11 | (P6, 11) | e.. sudah ada tapi belum maksimal. |  |
| 12 | (R, 12) | Nah,,sehubungan dengan peningkatan dari C ke B, mengapa Pemerintah Kabupaten Pangandaran bisa memperoleh kategori B dari sebelumnya mendapatkan kategori C. Adakah kunci suksesnya? |  |
| 13 | (P6, 13) | Yang tadi itu, makanya harus dilakukan monitoring itu jangan sampai hanya dilakukan pemenuhan berdasarkan pemenuhan dokumennya saja, Tetapi dokumen itu harus betul-betul hasil daripada pelaksanaan, begitu. Jadi nanti paham, atas pemenuhan dokumen seperti ini, berarti pelaksanaanya seperti ini, gitu. | * Perubahan orientasi dari kerja ke kinerja * Pemenuhan dokumen |
| 14 | (R, 14) | Nah.. cara, upaya untuk mengatasi kekurangan atau hambatan dari sisi SDM, nah upaya yang dilakukan oleh Pangandaran itu apa Pak? |  |
| 15 | (P6, 15) | Itu sebetulnya dari setiap SKPD ya ada kekurangan dari kualitas SDM. Selain itu setiap SKPD juga menyadari akan kebutuhan SDM, namun sekarang mah dicukup-cukupkan aja dulu yang penting gimana caranya kinerjanya bisa maksimal. Ada bimtek, asistensi, pendampingan, konsultasi. | * Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai * Kuantitas dan kualitas SDM sangat diperlukan * Memaksimalkan SDM yang tersedia * Bimtek * Pendampingan * konsultasi |
| 16 | (P6, 16) | Terus salah satunya Bappeda sudah melakukan e..apa? Studi banding ke Pemda Yogyakarta. | * Studi banding ke pemerintah daerah lain |
| 17 | (R, 17) | Pemprov? |  |
| 18 | (P6, 18) | Ke Pemda yah ke Pemprov DIY. |  |
| 19 | (P6, 19) | SAKIP nya itu kan udah bagus, dia memberikan masukan, gitu. Apa yang dicapai itu, salah satunya mungkin adanya aplikasi ROPK itu. | * Optimalisasi sistem teknologi informasi * ROPK |
| 20 | (P7, 20) | Sama Bimtek yang terus menerus dari Universitas Brawijaya. |  |
| 21 | (R, 21) | Oh..dari KemenPANRB sendiri, rekomendasi. Baik. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu tentang penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran jika disertai dengan SDM yang lebih memadai? |  |
| 22 | (P6, 22) | Insya Allah..apa-apa yang menjadi visi misi Pak Bupati itu akan terwujud lah. | * Penguatan akuntabilitas kinerja lebih maksimal |
| 23 | (R, 23) | Cuman pada intinya SDM juga mungkin terkendala di anggaran tadi ya Bu? |  |
| 24 | (P6, 24) | Iya.. Sehingga dimaksimalkan yang ada. | * Memaksimalkan SDM yang tersedia |
| 25 | (R, 25) | Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu jika terdapat pemerintah kabupaten/kota yang telah lama menjalankan fungsi pemerintahan, namun hasil evaluasi SAKIP nya sama atau bahkan lebih rendah dari Pangandaran yang terhitung baru? |  |
| 26 | (P6, 26) | Tapi saya yakin, setiap kabupaten juga mempunyai upaya-upaya yang mengarah ke arah yang lebih baik, cuman upaya-upayanya juga tadi satu kesepakatan, satu komitmen itu, gitu ya satu sama lain ya. Bagaimana caranya setiap OPD itu harus memberikan dukungan terkait tadi tujuan yang akan kita capai. Sebab sudah dibuat komitmen namun tidak dilakukan evaluasi, monitoring, akhirnya percuma. | * monitoring secara rutin |
| 27 | (R, 27) | Terkait dengan komitmen Kabupaten Pangandaran, adakah perbedaan dari e.. perbedaan kepala daerah mungkin ini yang difinitif, mungkin yang sebelumnya komitmennya apakah beda atau sama dalam penguatan akuntabilitas kinerja? |  |
| 28 | (P6, 28) | Iya kan RPJMD nya baru kemarin. |  |
| 29 | (R, 29) | e.. pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh atau dampak nyata penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan publik? |  |
| 30 | (P6, 30) | e... kita kan sekarang ada disamping audit keuangan ada audit kinerja juga, nah fungsinya audit kinerja itu untuk mencapai tiga unsur aspek yah, ekonomis, efektif, dan efisien. Nah itu salah satunya kita mengevaluasi SKPD terkait dan memberikan secara e..pelayanan publik misalnya di kesehatan, di Disdukcapil, perizinan, gitu. Kita kan melihat rencana kerja dari rencana program kerja mereka itu berapa lama sih misalnya pembuatan KK satu orang itu berapa menit, nah..nanti terealisasi atau tidaknya itu harus membuat, makanya tadi harus dievaluasi rencana kerja dengan realisasi apakah ada permasalahan atau tidak. Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga menyebabkan demikian. Terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya, identifikasi masalahnya. Nah itu haus diukur oleh si pemilik tadi risiko tersebut, misalnya di bidang mana, begitu. Terealiasi gak? Kalau terealisasi berarti itu sudah sesuai, begitu. Makanya SKPD-SKPD juga unsur manajemennya harus betul-betul dari pimpinan Eselon II sampai ke bawah itu harus sering melakukan aktivitas evaluasi terkait tadi, begitu. |  |
| 31 | (R, 31) | Ada pertanyaan tentang rencana, ya mungkin ini lebih ke Bappeda tapi kalau misalkan itu boleh dari sisi inspektorat saja Pak. Bagaimana rencana penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk periode berikutnya? |  |
| 32 | (P6, 32) | Ya disamping itu juga kita berencana akan melakukan koordinasi yang sangat intens gitu ya, bersama SKPD-SKPD terkait, gitu. Tadi, dalam rangka rencana mewujudkan tujuan tersebut kita evaluasi. Jadi ada tim khusus untuk mengevaluasi hasil daripada kinerja, gitu, yang sudah dilakukan oleh SKPD-SKPD. Jadi tidak hanya SKPD terkait saja, tapi dijadikan tanggungjawab dari beberapa SKPD terkait. Kita akan terjun langsung, memantau, mengevaluasi, gitu. Disamping itu salah satu tugas dari inspektorat melakukan evaluasi, *review,* gitu. Tapi juga ada tim secara khusus untuk melakukan Monev terkait rencana e.. program yang akan dilakukan sesuai dengan RPJMD tersebut. | * Koordinas setiap OPD. * Monitoring secara rutin * Pembuatan tim khusus evaluasi selain inspektorat |
| 33 | (R, 33) | Nah dalam upaya mewujudkan rencana tersebut, faktor apa saja yang dianggap masih belum memadai? |  |
| 34 | (P6, 34) | Banyak sih. |  |
| 35 | (R, 35) | Yang paling belum memadai? |  |
| 36 | (P6, 36) | SKPD itu juga kan SPI nya perlu ditingkatkan. | * SPI setiap OPD |
| 37 | (R, 37) | Dari sudut pandang evaluator, dari inspektorat, ide atau gagasan apa yang dianggap bisa menguatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk periode yang akan datang? Tadi sudah ada Monev yang rutin, selain itu? |  |
| 38 | (P6, 38) | Jadi sebetulnya kalau inspektorat ini kan sudah melangkah sekarang ini selain kita melakukan kewajiban untuk melakukan pengawasan, kita juga selama ini melakukan asistensi *assurance*, pendampingan, konsultasi, itu salah satunya untuk meningkatkan kompetensi SDM mereka. Jadi, kalau kita kan di PKPP itu sudah rencana program kerjanya sudah penuh yah, tetapi kita tidak menutup kemungkinan bagi SKPD yang memerlukan pemahaman terkait apa saja gitu yah yang ada di program mereka atau rencana-rencana mereka itu bisa memohon untuk dilakukan misalnya pendampingan atau silakan konsultasil, gitu. Nanti kami menyediakan, meluangkan waktu lah waktu tertentu untuk memberikan pemahaman kepada mereka, itu salah satunya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja ini. Selain itu juga kami memohon kepada mereka bahwa diberikan pemahaman itu mereka juga harus mau, mau mebaca pedoman ketentuan agar dapat dipahami. Jangan sampai kita melakukan pendampingan, pada saat sudah diberikan pemahaman, mereka tidak melaksanakan. Nah itu, gitu. Jadi disamping kita memberikan asistensi, memberikan pendampingan, mereka juga harus memahami dan harus di laksakan sesuai dengan ketentuan tersebut, gitu. Jadi harus berkelanjutan lah intinya mah. Nanti kan kalau dia sudah paham, dia kerjakan, terus mereka membuat angka-angka yang sesuai dengan ketentuan, laporan-laporan, dan itu pasti sistem pengendalian intern itu sebelum kita melakukan pengawasan juga kan disitu sudah ada pengendalian di internalnya, gitu. Dievaluasi oleh pihak internal. Sudah belum dibuat? Sudah belum dilaksanakan? Sudah ada belum pelaorannya? Itu sistem SPI yang harus berjalan di internal. Jadi itu harus ada, harus ada komitmennya dari atas ke bawah, dan itu tetap kalau menurut saya dievaluasi. Jadi jangan hanya membuat itu saja tanpa ada dilihat, gitu. Kaya audit kinerja kan harus ada penjelasannya. Mana bukti pendukungnya? Mana laporannya? Mana bukti dokumentasinya? Tidak hanya mengatakan bahwa hal ini sudah dilaksanakan, tidak cukup seperti itu. Tetep kita harus melihat observasi dari pendukung-pendukung hal itu, karena pada saat sekarang kegiatan itu bisa dinyatakan dilaksanakan atau dilaksanakan apabila buktinya memadai. | * Pendampingan * Pemenuhan dokumen |
| 39 | (R, 39) | Pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Bapak dan Ibu agar penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran bisa menjadi lebih baik dan berkelanjutan? |  |
| 40 | (P6, 40) | Kalau dari Inspektorat, harapan dan keinginan bagi OPD-OPD yang selama ini kita lakukan pengawasan, evaluasi, *review,* untuk cepat tanggap. Cepat tanggap respon atas rekomendasi yang diberikan, atas pemahaman yang diberikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu saja. Jadi, kalau misalnya kita memberikan rekomendasi, atau bimtek, pemahaman-pemahaman, gitu. Itu harus respon cepat tanggap dan harus secepatnya dilaksanakan dengan menambah secara pribadinya tadi dilakukan untuk membantu lebih didalam pengawasannya, gitu. | * Responsif terhadap rekomendasi |
| 41 | (R, 41) | Ada yang lain Bu? Bapak, ada tambahan? |  |
| 42 | (P6, 42) | Jadi rencana ROPK disini, setiap penugasan itu sudah jelas dengan tupoksinya. Apa yang akan dia kerjakan? Apa yang akan dia laksanakan? Dari mulai pelaksanaan kegiatannya sampai rencana kebutuhannya termasuk anggarannya. Itu sudah di ROPK detail. Apa yang akan dilaksanakan? Persiapannya seperti apa? Perencanaannya seperti apa? Pelaksanaanya seperti apa? Pelaporannya seperti apa? Nah itu di ROPK rencananya sudah jelas. Jadi, nanti tinggal ceklis-ceklis mana yang belum dikerjakan? Nah itu rencananya, nanti dengan SKPD terkait, apabila di salah satu yang sudah ditulis di ROPK itu, maka itu akan menghambat kepada pencairan, gitu. Jadi, sudah jelas nanti perhitungan, perhitungan realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatannya akan dilihat daripada nanti keberhasilan sesuai tidak dengan rencananya itu? Ada tidak faktor penunjangnya, seperti itu. Kalau rencana dengan pelaksanaan tidak sinkron, salah satunya mungkin belum terpenuhi, maka ini yang akan nanti jadi faktor penghambat saat melakukan perifikasi. | * ROPK |
| 43 | (R, 43) | Imbasnya kesana? |  |
| 44 | (P6, 44) | Iya.. gitu. Tapi mudah-mudahan rencana ROPK ini yang katanya sudah dilaksanakan di DIY itu, mudah-mudahan akan diterapkan di Pangandaran. Kalau tujuannya maksudnya itu, untuk mempermudah ya kita melakukan evaluasi atau pemantauan terkait dengan penyerapan anggaran maupun dengan hasil evaluasi kinerja. | * Optimalisasi sistem teknologi informasi * ROPK |
| 45 | (R, 45) | Baik, sekian pertanyaan wawancara dari saya, terimakasih atas waktu dan kesempatannya dan Insya Allah nanti saya akan kembali untuk menyerahkan transkrip wawancara ini untuk dikonfirmasi kepada setiap partisipan penelitian ini. |  |